

**PERAN PEMERINTAH DESA TERKAIT PENANGGULANGAN PERMASALAHAN
KENAIKAN HARGA BERAS DI MASYARAKAT KELURAHAN JETIS**

Cindy Atika Zulaeka, Destina Rina Susanti, Fitri Novia Maharani, Aris Prio Agus Santoso
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted: 19 April 2024

Accepted: 28 April 2024

Published: 29 April 2024

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi harga bahan pokok di pasar untuk mengetahui peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap Pemerintah Kelurahan Jetis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi harga bahan pokok di Pasar terjadi fluktuatif namun cenderung stabil, karena kenaikan/penurunan harganya tidak terlalu signifikan. Peran Pemerintah Desa dengan mengawasi roda perekonomian seperti mengecek ketersediaan barang, keakuratan alat ukur pedagang, masa kadaluarsa dan barang tak layak jual, dan juga melakukan pencatatan harga sembako untuk dikirimkan kepada Bappeda yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Bahan Pokok, Harga.

ABSTRACT

This research aims to determine the condition of prices of basic commodities in the market to determine the role of the government in maintaining the stability of prices of basic commodities. This research method uses qualitative data collection methods, by conducting interviews and observations of the Jetis Village Government. The research results show that the price of basic commodities in the market fluctuates but tends to be stable, because the price increases/decrease are not too significant. The role of the Village Government is to monitor the wheels of the economy, such as checking the availability of goods, the accuracy of traders' measuring instruments, expiry dates and goods that are not fit for sale, and also recording the prices of basic necessities to be sent to Bappeda which is then published to the public.

Keywords: staple food, rice

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, yang diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran di Indonesia dan tingkat kemakmuran rakyatnya masih dibilang dalam kategori kurang. Pertumbuhan penduduk juga sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran negara.

Indonesia sebagai sebuah negara dalam pembangunan, pada hakekatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah harus memastikan masyarakatnya terpenuhi kebutuhan pangannya. Salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak

goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur, susu, jagung, minyak tanah, garam, dll. Negara yang sejahtera ialah negara yang mempunyai ketahanan bahan pokok. Ketahanan bahan pokok adalah tercukupinya kebutuhan bahan yang dilihat dari ketersediaan stok bahan pokok baik dalam jumlah maupun mutu bahan pokok tersebut.

Di Indonesia barang yang sering mengalami ketidakstabilan harga adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang sering disebut sembako. Sembako ialah kebutuhan pokok sehari-hari yang wajib ada dijual dipasar. Pengkategorian produk-produk yang termasuk dalam sembako menjadi penting sebab pemerintah harus menjamin keberadaan produk-produk tersebut dan bertanggung jawab untuk tidak membiarkan stok barang dan harganya menjadi liar mengikuti mekanisme pasar. Ketidakstabilan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah tentang kuota impor barang dari luar negeri serta adanya ulah nakal oknum pedagang yang menimbun barang pada saat-saat tertentu seperti saat menjelang hari raya Idul Fitri, natal dan tahun baru.

Salah satu instansi yang menangani mengenai permasalahan pasar adalah Dinas Koperasi dan Perdagangan. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki tugas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Manajemen kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha mewujudkan visi dan misi organisasi. Pemerintah Kelurahan Jetis yang salah satu perannya ialah menjaga kestabilan harga bahan pokok. Oleh sebab itu, harga bahan pokok yang tidak stabil serta kelancaran distribusi barang dan jasa dan kelangkaan bahan pokok perlu dipertanyakan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Peran pemerintah tetap bertahan sebagai salah satu pilihan untuk dijadikan bagian dari kebijakan pembangunan guna pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Terbukti pemerintah hingga saat ini tetap masuk dalam bagian program pembangunan yang dijalankan pemerintah sekarang termasuk dalam pengembangan dan pelatihan UKM di Kabupeten atau Kota Daerah Indonesia. Masalah kelangkaan terhadap bahan pokok maupun kenaikan harga terhadap bahan pokok seharusnya perlu ditelusuri oleh pemerintah. Sehingga pemerintah tahu apa penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi.

Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak terjadi permasalahan seperti kelangkaan terhadap bahan pokok. Selain itu pemerintah sebagai salah satu pembuat kebijakan dapat melakukan intervensi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah memiliki peranan yang cukup penting dalam permasalahan ekonomi ini, karena pada dasarnya sektor publik memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Dapat diranahkan suatu masalah dari latar belakang diantaranya: 1. Apa tanggapan pemerintah terkait kenaikan harga beras di masyarakat Kelurahan Jetis? 2. Bagaimana peran pemerintah terkait penanggulangan kenaikan harga beras di masyarakat Kelurahan Jetis?

Bahan Pokok

Sembilan bahan pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat. Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 (disingkat: "Kepmenperindag 115/1998"). Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/MDAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen ("Permendag 27/2017") yang mulai berlaku pada 16 Mei 2017. Daftar sembilan bahan pokok itu, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas elpiji dan minyak tanah, serta garam.

Sembako atau sembilan bahan pokok dianggap sebagai bahan-bahan dasar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sebenarnya istilah sembako pertama kali populer setelah terjadinya krisis moneter sekitar tahun 1998 lalu. Kesembilan bahan pokok dibutuhkan oleh semua kalangan. Tanpa sembako kehidupan rakyat bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar. Usaha sembako merupakan usaha yang tentu saja terus bertahan (selama manusia perlu makan). Selain itu usaha distributor sembako termasuk mengerti tujuan pasarnya, perumpamaan senang menyasar kelas rumahan, restoran atau kelas industri. Dari sisi ekonomi permintaan barang-barang sembako bersifat inelastis, yaitu perubahan harga sembako tidak akan banyak mempengaruhi tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak terlalu signifikan. Jika harga sembilan bahan pokok tersebut naik secara signifikan, maka sebagian konsumen akan beralih ke produk serupa pengganti (substitusi).

Harga

Harga adalah jumlah yang harus dibayar pelanggan pada suatu produk. Harga suatu produk merupakan faktor penentu permintaan pasar pada suatu barang atau jasa. Harga selain merupakan jalan masuknya uang ke perusahaan, juga berhubungan dengan kualitas suatu produk. Konsumen memandang harga sebagai indikator kualitas suatu produk, terutama jika mereka harus mengambil keputusan membeli dengan informasi yang tidak lengkap. Harga juga sering kali digunakan sebagai indikator nilai apabila harga tersebut dihubungkan dengan manfaat atas suatu produk barang atau jasa. Apabila manfaat yang dirasakan oleh konsumen tinggi, maka konsumen akan memberikan nilai harga yang tinggi pula. Akan tetapi, dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa.

Peran Pemerintah

Pemerintah ditugaskan mengawasi, mengatur serta mengarahkan bekerjanya sistem pasar dan mengendalikan harga yang terbentuk di pasar. Dalam melakukan penetapan harga, pemerintah bisa melalui dua cara, yaitu HET (Harga Eceran Tertinggi) atau ceiling price dan Harga Dasar atau floor price. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan HET. Maksud HET ialah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Persoalan yang timbul apabila HET ditetapkan lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar ialah bahwa pada harga HET itu jumlah yang akan dibeli lebih besar daripada jumlah yang akan dijual, sehingga timbul kekurangan suplai. Idealnya sebuah pasar adalah kesinergisan antara produsen, konsumen, distributor dan pemerintah. Ketika keempat unsur diatas saling bekerjasama maka semua pihak akan diuntungkan tidak akan terjadi kerugian bagi pihak kecil demi kepentingan berbagai pihak. Yang kuat dan kaya akan semakin kaya dan kebalikannya yang miskin makin miskin dan tidak dapat bersaing di pasar. Disinilah peran campur tangan pemerintah dalam pengendalian perekonomian sebuah pasar. Peran pemerintah dalam perekonomian pasar memang tergantung pada kondisi pasar yang berkembang. Di saat pasar sedang normal dalam perputaran perekonomiannya, pemerintah berfungsi sebagai pengawas dalam pasar tersebut agar tidak terjadi praktek yang menyeleweng dari konsep teori pasar yang ada.

Pada saat perekonomian pasar sudah tidak sesuai dengan teori praktek yang ada, pemerintah disini wajib campur tangan demi stabilitas pasar tersebut, seperti monopoli pasar oleh satu kelompok, yang mana ketika terjadi monopoli pasar, perputaran barang dan jasa yang ada akan terhambat, pihak lain akan dirugikan oleh keadaan tersebut. disini pemerintah turut campur tangan dengan mengontrol dan memberi peringatan. Cara lain yang dilakukan oleh

pemerintah adalah dibuat undang-undang tentang barang atau jasa yang urgen bagi masyarakat dikuasai oleh negara, jadi barang tersebut tidak bisa di monopoli oleh seorang atau kelompok. Pemerintah sangatlah berperan besar dalam stabilitas pasar dengan ikut campur tangan dalam perekonomian pasar maka di pasar akan stabil dalam perputarannya. Dengan berbagai metode konsep yang ideal dari pemerintah untuk menghadang pelaku monopoli.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif-deskriptif fokus pada pengumpulan data dari latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang diamati, dengan penekanan lebih pada pemahaman makna dibandingkan dengan generalisasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen, laporan, dan arsip-arsip lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan menggunakan pendekatan dan teknik ini, penelitian berupaya mendapatkan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai topik atau fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan melalui proses wawancara di Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Wawancara ini dilakukan oleh Bapak Kurniawan Rusidi, S.Pd pada tanggal 25 Maret 2024. Wawancara dengan Bapak Kurniawan Rusidi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan terkait dengan topik atau fenomena yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Dengan melakukan wawancara di lokasi dan dengan narasumber yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai masalah atau topik yang sedang diselidiki.

HASIL & PEMBAHASAN

Pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mensejahterakan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, disamping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan penghasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana mendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat (Tulus T.H. Tambunan, 2012).

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. **Fungsi Stabilisasi**, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
2. **Fungsi Alokasi**, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
3. **Fungsi Distribusi**, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.
2. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.
3. Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk

Dinas Koperasi dan perdagangan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah terutama pemerintah daerah, menjalankan perannya sebagai pengawas, yang megawasi jalannya roda perekonomian di pasar, dengan menjaga kestabilan harga bahan pokok, menjaga ketersediaan barang di pasar, serta menjamin agar kegiatan ekonomi tidak merugikan salah satu pihak terutama para konsumen, dengan mengecek secara berkala kondisi barang yang diperjualbelikan tidak melanggar ketentuan pemerintah, maupun menjaga agar kuantitas barang sesuai yang seharusnya dengan melakukan pengecekan terhadap alat ukur yang digunakan oleh para pedagang, seperti timbangan.

Data Penelitian

Berdasarkan hasil obsevasi dilapangan, harga bahan pokok dipasar pusat Kisaran pada minggu keempat bulan Januari 2024 mengalami fluktuasi pada komoditi Ayam Broiler yang naik dari minggu pertama bulan Januari diharga Rp. 25.000 menjadi Rp. 28.000. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi minyak goreng kemasan yaitu dari harga Rp. 18.000 menjadi Rp. 21.000 untuk jenis minyak goreng bimoli, dan untuk jenis minyak goreng curah harga tetap stabil dari minggu pertama bulan Januari hingga minggu keempat bulan Januari yaitu dengan harga Rp. 18.000. Namun hal itu terjadi hanya dalam beberapa minggu saja, kemudian harga-harga tersebut kembali normal. Kenaikan harga terjadi namun masih bisa dijangkau masyarakat. Sehingga masyarakat tidak terlalu resah dengan kenaikan harga yang terjadi.

Kemudian pada komoditi lain juga terjadi kenaikan harga yaitu pada jenis komoditi cabai rawit. Pada awal minggu pertama bulan Januari harga cabai rawit mencapai Rp. 40.000/kg nya, kemudian naik menjadi Rp. 42.000/kg, kemudian pada minggu ketiga naik lagi menjadi Rp. 60.000/kg. Dan kenaikan itu terus terjadi hingga minggu keempat bulan Januari dengan harga mencapai Rp. 65. 000/kg. Hal ini menyebabkan masyarakat mengurangi pemakaian cabai rawit dalam rumah tangga, bahkan ada juga masyarakat tidak menggunakan cabai rawit di rumah tangga dalam 1 (satu) bulan itu. Komoditi lain selain ayam, telur, minyak goreng kemasan, dan juga cabai rawit tidak mengalami fluktuasi harga. Harga komoditi lain seperti beras, gula, bawang putih, bawang merah, tepung terigu, kacang kedelai, cabai merah, jagung, dan juga ikan masih dengan harga yang stabil mulai awal minggu pertama hingga akhir minggu keempat bulan Januari. Tidak ada kenaikan harga yang terjadi pada komoditi tersebut selama 1(satu) bulan itu.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang sembako yang berjualan sudah bertahun-tahun, bahan pokok yang mengalami kenaikan terjadi karena kurangnya pasokan

barang dari pemasok akibat cuaca yang tidak mendukung yang menyebabkan petani gagal panen, sehingga stok menipis dan berkurang, sedangkan permintaan tetap. Namun, harga barang yang naik secara drastis membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian, semisal saat cabai rawit dihargai Rp40.000, pembeli biasa membeli hingga 2-3kg, namun saat harga mencapai Rp110.000/kg, pembeli hanya membeli 1-1,5kg saja.

Selain itu harga minyak goreng yang terus naik dan bahkan sudah mulai langka membuat sebagian masyarakat resah. Dalam kondisi ini pemerintah memberi subsidi minyak goreng dengan harga Rp. 14.000/liter. Namun para pedagang juga belum bisa seutuhnya menjual dengan harga Rp. 14.000/liter karena subsidi dari pemerintah masih sangat terbatas. Terlebih lagi minyak goreng yang ada pada para pedagang mereka beli saat belum ada subsidi dari pemerintah. Jadi apabila para pedagang tersebut menjual dengan harga Rp. 14.000/liter maka para pedagang tersebut akan mengalami kerugian yang lumayan besar.

KESIMPULAN

Untuk mensejahterakan masyarakat dibutuhkan bahan-bahan pokok (sembako) yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Dinas Koperasi dan Perdagangan sebagai kepanjangan tangan pemerintah terutama pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai pengawas, yang mengawasi jalannya roda perekonomian dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok, menjaga ketersediaan barang dipasar serta menjamin agar kegiatan ekonomi dipasar tidak merugikan salah satu pihak terutama konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Mohammad Arfandi. Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Peningkatan Daya Saing UKM di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi, Vol 2 No.2. 2017.
- Auliya, Aziza Nur dan Lukman Arif. (2021). Peran dinas koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan dalam penanganan dampak pandemi covid-19 pada usaha mikro di kabupaten gresik. Jurnal Reformasi Administrasi, volume 8 No 1, 25.
- Bahagia, Fajar. Peran dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten aceh besar dalam meningkatkan ekonomi pengrajin rencong di gampong baet, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 21.
- Hidayatullah, Indra. Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar, Jurnal Ekonomi Islam. Vol 8 No 1. 2018.
- Kristanti, Ratna Dewi. Peran dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan kota batu dalam perolehan hak merek bagi umkm berbasis produk olahan pertanian-peternakan, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Rahmayana, peran dinas koperasi dan usaha makro kecil dan menengah dalam pengembangan usaha batik jambi, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021.
- Rizki, Eka Noer. Peran dinas perdagangan kota surabaya dalam meningkatkan umkm di kota surabaya, 178.
- Setiono, Betsy. Peran dinas perdagangan dan perindustrian kota surabaya dalam perolehan hak merek bagi usaha kecil menengah inovatif, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 5.
- Siregar, Syifa Nabila dan Mustafa Kamal Rokan. (2021). Peran Disdagper(Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Pasar Bahagia dan

Pasar Suprpto Kota Tanjungbalai. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5 Nomor 3, 8249.

Yulinsyah, Dian, dkk. Peran dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota pasuruan dalam menumbuhkan modal sosial, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No.4, 160.